



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

Nomor : **195.157/PUU/PAN.MK/SP/11/2023**

22 November 2023

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 157/PUU-XXI/2023

Yth. Presiden Republik Indonesia

Jalan Veteran Nomor 17-18

Jakarta 10110

Menindaklanjuti perintah Ketua Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi*".

Sehubungan dengan itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia salinan permohonan Nomor 157/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 13:30 WIB. Sambil menunggu pemberitahuan dan panggilan sidang dalam rangka pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, Mahkamah Konstitusi mempersilakan Presiden Republik Indonesia mempersiapkan keterangan perihal permohonan sebagaimana dimaksud.

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Presiden Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Panitera

Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
3. Yth. Menteri Sekretaris Negara
4. Yth. Menteri Hukum dan HAM
5. Yth. Sekretaris Kabinet





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 195.157/PUU/PAN.MK/BASP/11/2023**

Pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 14:09 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 157/PUU-XXI/2023 kepada Presiden Republik Indonesia di Jalan Veteran Nomor 17-18 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

